



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN**

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)



DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO SELATAN

**JL. PAHLAWAN KM. 6 BUNTOK KABUPATEN BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan bimbingan-Nya sehingga akhirnya kami berhasil menyelesaikan tugas kami dalam rangka penyusunan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2022-2026.

Pembuatan LAKIP ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan sebagai penyelenggara pemerintahan kepada pemberi mandat, delegasi dan wewenang yang berisi tentang kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan secara periodik dan melembaga.

Harapan kami semoga LAKIP ini juga dapat mendukung dan melaksanakan Visi, Misi dan sapta program Pemerintah Kab. Barito Selatan menjadi Daerah Kabupaten yang Dahani Dahanai Tuntung Tulus.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa pembuatan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan rendah hati dan tangan terbuka kami menerima kritik dan saran untuk penyempurnaan dan perbaikan lebih lanjut.

Semoga LAKIP ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagai bahan masukan lebih lanjut terima kasih.

Buntok, 10 Februari 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Barito Selatan



JONI PRIAWAN, S.P., M.Si
Pembina Utama (IV/b)
NIP. 19690602 199803 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIii

RINGKASAN EKSEKUTIFii

BAGIAN PERTAMA : GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEJIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Gambaran Umum..... 1

 B. Struktur Organisasi 1

 C. Sumber Daya Manusia.....2

 D. Posisi Stratejik6

 E. Maksud dan Tujuan LAKIP.....6

 F. Sistematika Penyusunan LAKIP.....7

BAB II RENCANA STRATEJIK DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN8

 A. Rencana Stratejik.....8

 B. Pernyataan Visi dan Misi.....8

 C. Tujuan dan Sasaran Stratejik.....10

 D. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran.....11

 E. Rencana Kinerja.....13

BAGIAN KEDUA : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

BAB I PENGUKURAN KINERJA17

 A. Indikator Kinerja 17

 B. Pengukuran Kinerja Tahun 2024.....19

 C. Aspek Keuangan Tahun 2024.....29

BAB II UPAYA PEMECAHAN MASALAH32

BAB III PENUTUP34

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sistem penerapan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam laporan ini telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

Tujuan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan
2. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang dapat mengakses seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.
3. Terwujudnya pelayanan jasa transportasi bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat
4. Terwujudnya penurunan angka kecelakaan antar moda transportasi menuju kecelakaan yang nihil.
5. Meningkatkan organisasi yang profesional dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai dibidang tugasnya.

Sasaran :

1. Tersedianya armada pada setiap jalur transportasi dan tersedianya fasilitas dermaga, terminal yang memadai untuk mendukung kelancaran mobilitas angkutan barang dan jasa yang menghubungkan seluruh Wilayah di Kabupaten Barito Selatan.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dan tersedianya peraturan daerah yang mengatur standar tarif angkutan Darat, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Udara
3. Tersedianya fasilitas keselamatan penumpang yang berupa rambu-rambu lalu lintas dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas sarana transportasi.
4. Tersedianya tenaga aparatur yang memadai di bidang pengelolaan administrasi, keuangan dan kepengurusan barang
5. Tersedianya tenaga teknis dalam upaya mendukung peningkatan pembangunan dibidang transportasi.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut masih banyak masalah yang dihadapi dan langkah – langkah pemecahannya yaitu :

1. Belum adanya Alat Uji Balai Pengujian Kendaraan Bermotor dan belum adanya perlengkapan karena keterbatasan anggaran yang tersedia.
2. Langkah–langkah yang diambil adalah dengan mengusulkan pembangunan balai pengujian secara bertahap dan pengusulan pengadaan alat Pengujian Kendaraan Bermotor dengan dana APBN dan APBD Provinsi.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kualifikasi
4. Sasaran untuk rambu lalu lintas banyak yang belum terpenuhi, pemecahannya telah diusulkan pengadaan rambu.
5. Sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM dengan cara meningkatkan Diklat–diklat Teknis dan mengoptimalkan tenaga yang ada serta pengusulan tenaga tambahan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Barito Selatan.
6. Dishub telah melakukan pengusulan kepada Balai dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Pengadaan Rambu – Rambu dan Alat Kegiatan Lainnya di Daerah Kab Barito Selatan.

BAGIAN PERTAMA
GAMBARAN UMUM RENCANA STRATEGIK
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan. dan dalam menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang perhubungan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut (Bagan Struktur Organisasi terlampir) :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat membawahkan dan mengoordinasikan :

1. Sub Bagian Umum
2. Sub Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

1. Seksi Angkutan Orang;
2. Seksi Angkutan Barang;

d. Bidang Pelayaran :

1. Seksi Angkutan SDP dan Pelayaran Angkutan laut;
2. Seksi Kepelabuhanan dan Terminal Khusus untuk Kepentingan Sendiri ;

e. Bidang Operasional dan Rekayasa Lalu Lintas :

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Masing – masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 4) Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- 5) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

C. Sumber Daya Manusia

Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Jumlah Pegawai eselonering dan pelaksana adalah sebagai berikut :

1. Eselonering :
- Eselon II .b

:

1

Orang
- Eselon III .a

:

1

Orang
- Eselon III .b

:

3

Orang
- Eselon IV. a

:

13

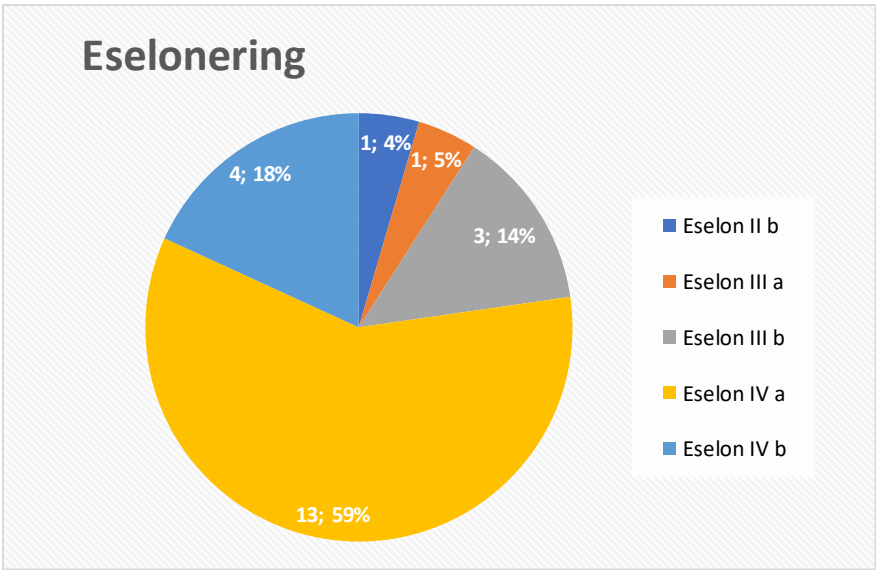
Orang
- Eselon IV. b

:

4

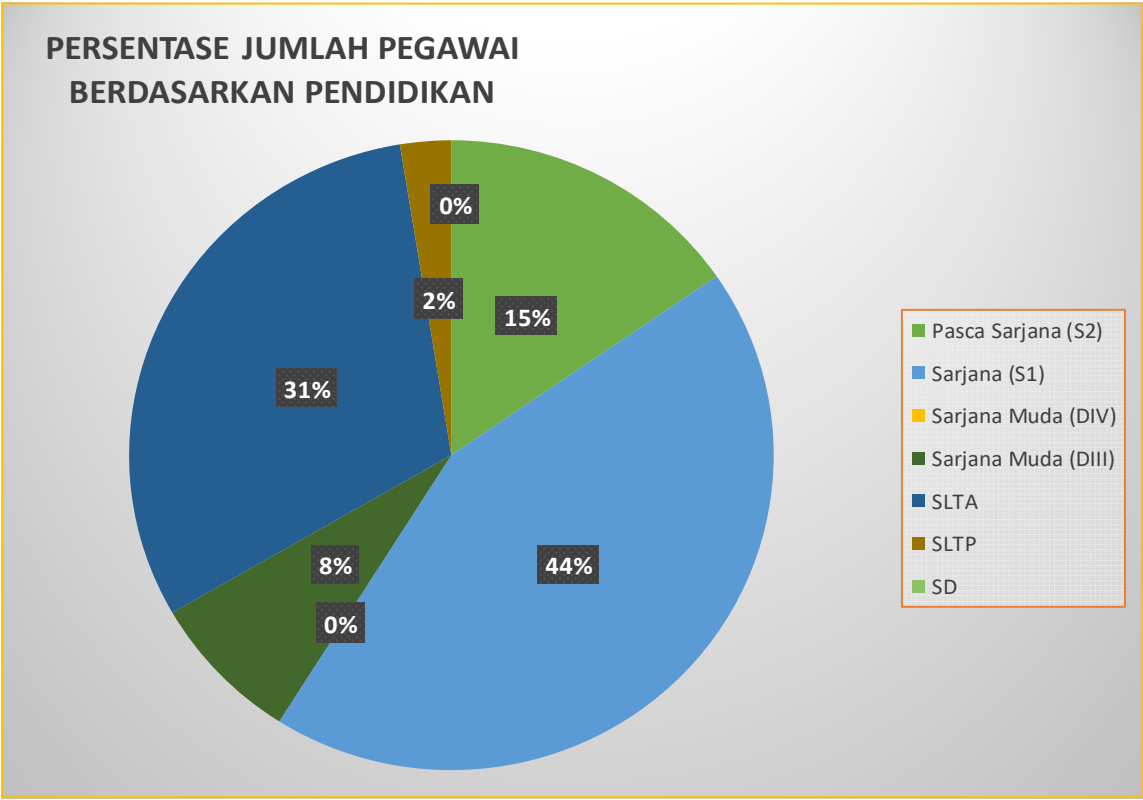
Orang

2. Pejabat Fungsional/Pelaksana : 22 Orang



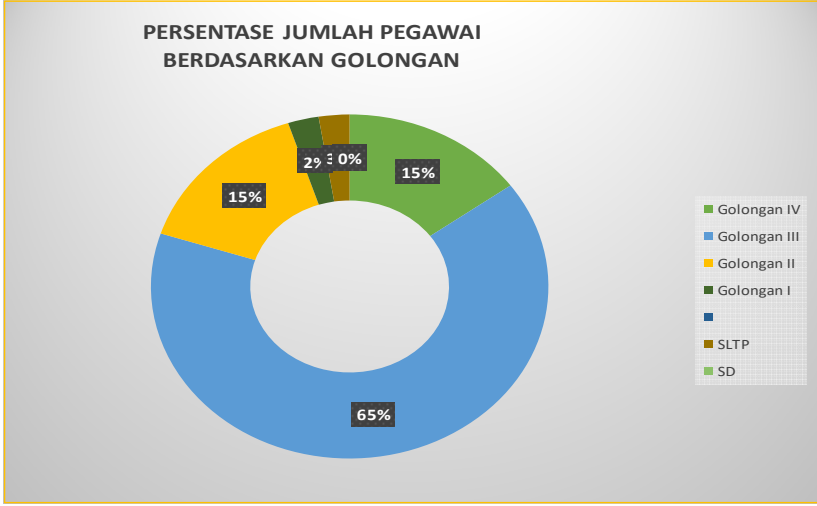
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pada tingkat pendidikan adalah :

-	Pasca Sarjana (S2)	:	6	Orang
-	Sarjana (S1)	:	17	Orang
-	Sarjana Muda (DIV)	:	-	Orang
-	Sarjana Muda (DIII)	:	3	Orang
-	SLTA	:	1	Orang
-	SLTP	:	-	Orang
-	SD	:	1	Orang
Jumlah		:	39	Orang



Sedangkan menurut golongan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV	:	6	Orang
- Golongan III	:	26	Orang
- Golongan II	:	6	Orang
- Golongan I	:	1	Orang
Jumlah		: 39	Orang



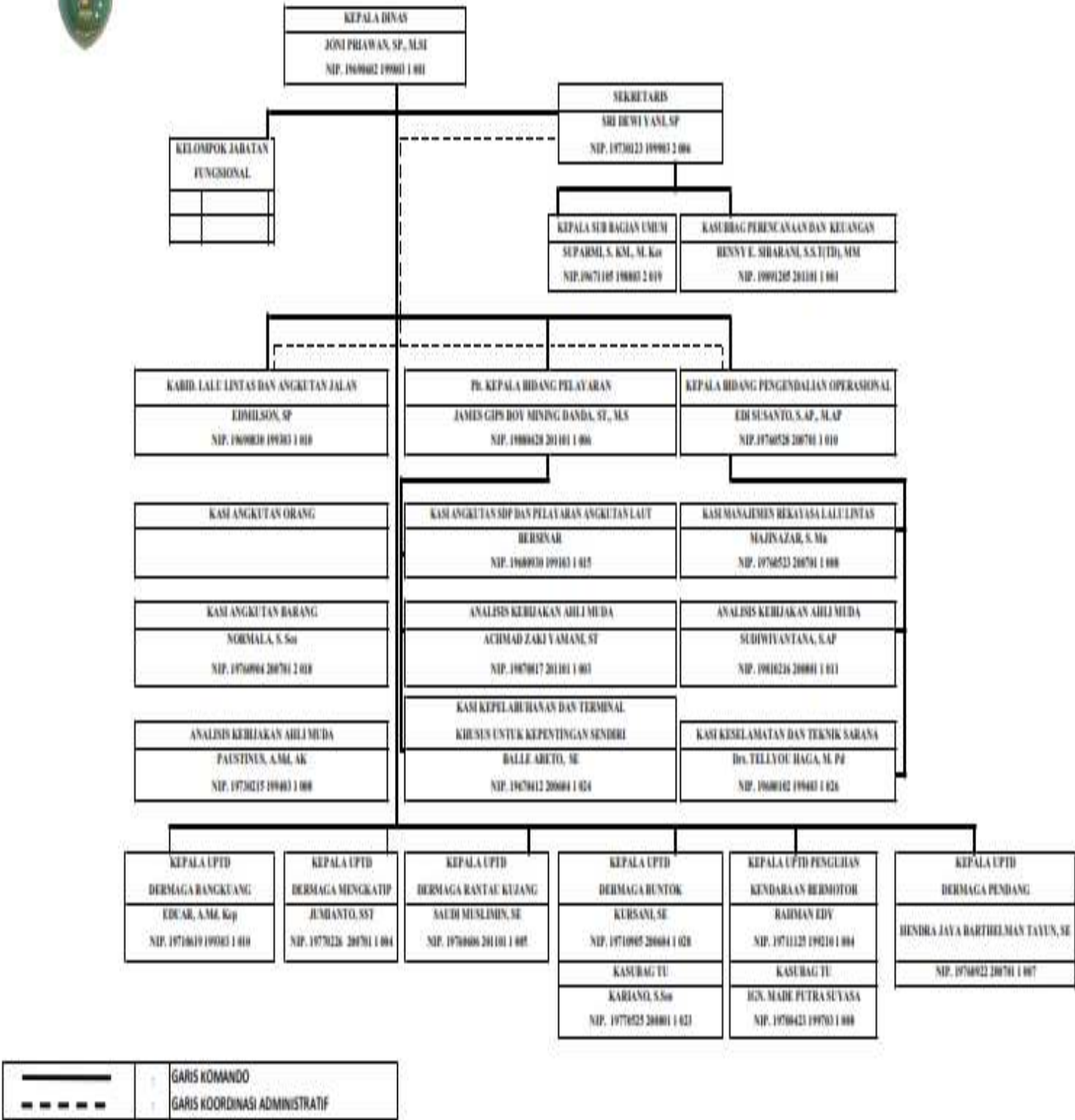
Selain PNS di atas terdapat pula pegawai tenaga tidak tetap (Honorer) sebanyak 82 orang dengan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana (S1)	:	22	Orang
- Sarjana Muda (DIII)	:	3	Orang
- SLTA	:	54	Orang
- SLTA Paket (C)	:	1	Orang
- SLTP	:	1	Orang
- SLTP Paket (B)	:	1	Orang
- SD	:	-	Orang
Jumlah	:	82	Orang

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TIPE B KABUPATEN BARITO SELATAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN TIPE B KABUPATEN BARITO SELATAN



D. Posisi Strategis

Dengan dibukanya jalur transportasi Palangka Raya – Buntok, maka posisi strategik Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan akan semakin Nampak penting diman berada pada titik persimpangan / transit lalu lintas antara Palangka Raya – Buntok – Barito Timur dan posisi strategis ini juga dimiliki oleh Kab Barito Selatan sebagai pitu masuk dan keluarnya angkutan sungai dan barang serta hasil bumi, Tambang , Kehutanan, Perkebunan di DAS Barito yang berbeda di Provinsi Kalimantan Tengah karena dapat di layani oleh angkutan kapal sungai dan laut baik dari Kabupaten Murung Raya, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Timur, maupun dari Kabupaten Kapuas dan Banjarmasin ke Kabupaten yang ada di DAS Barito tersebut hal tentu sangat berperan dalam mengantisipasi terjadinya perkembangan di sektor perhubungan yang akan dating, dan dari segi sangat penting peranannya dinamakan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan berperan sebagai dinas di seluruh Kabupaten Barito Selatan.

Dalam menunjang kelancaran perkembangan arus lalu lintas baik darat, sungai, udara, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam langkah membangun Infrastruktur perhubungan didaerah dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas dan angkutan.

Hal ini didukung pula aset-aset yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan seperti adanya :

1 buah terminal tipe C, 5 buah dermaga sungai, 4 buah bus, 2 buah mobil PATWAS, 1 buah mobil siaran (Rusak Berat), 2 buah sepeda motor patroli dan aset-aset dinas yang lain.

E. Maksud dan Tujuan LAKIP

Maksud dan tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban secara periodik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pengganti dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sehingga Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab demi terselenggaranya **good governance** yang merupakan persyaratan utama dalam mewujudkan pemerintah yang aspiratif, mengutamakan kepentingan rakyat banyak dan berkeadilan. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

F. Sistematika Penyusunan LAKIP 2024

Penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

Bagian Pertama tentang Gambaran Umum dan Rencana Strategik Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang berisikan Bab I . Pendahuluan yang meliputi Gambaran Umum, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Posisi Strategik, Maksud dan Tujuan LAKIP serta Sistematika Penyusunan LAKIP. BAB II. Rencana Strategik yang meliputi Rencana Strategik, Pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategik, Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran serta Rencana Kinerja.

Bagian Kedua Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 yang berisikan Bab I Pengukuran Kinerja meliputi Indikator Kinerja, Pengukuran Kinerja Tahun 2024 dan Aspek Keuangan, Bab II Upaya Pemecahan Masalah dan Bab III Penutup serta Lampiran-lampiran.

BAB II
RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BARITO SELATAN

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis (Renstra) disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan yang telah melibatkan unsur-unsur yang ada pada Dinas Perhubungan. Dalam penyusunan renstra telah mempertimbangkan juga faktor-faktor lingkungan internal dan external organisasi, dan memperhatikan pula arahan dari Bupati Barito Selatan serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat.

B. Pernyataan Visi dan Misi

A. Visi

Visi merupakan suatu cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana suatu organisasi akan diarahkan agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta inovatif atau dengan kata lain visi adalah merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan/dicapai oleh suatu organisasi.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan maka ditetapkanlah visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Transportasi, yang lancar, aman, tertib, nyaman dan terjangkau , handal dan kompetitif“.

Pengertian secara umum visi tersebut diatas ditujukan untuk intern dan ekstern organisasi Dinas Pehubungan, secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kata **Terwujudnya** menggambarkan suatu hasil dari serangkaian rencana dan pekerjaan yang dilaksanakan dalam hal ini Transportasi, yang lancar, aman, tertib, nyaman dan terjangkau.
2. Kata **Transportasi** merupakan pergerakan barang maupun penumpang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor.
3. Kata **Lancar** adalah kegiatan operasional alat angkutan yang tidak mengalami hambatan terutama ditinjau dari segi teknis kendaraan.
4. Kata **Aman** yang berarti terhindar dari segala gangguan baik tindak kriminal maupun gangguan teknis alat angkutan.

5. Kata **Tertib** yang berarti didalam melakukan operasional alat angkutannya adanya keteraturan sehingga ada keseimbangan antara penyedia dan pemakai jasa angkutan.
6. Kata **Nyaman** yang berarti para pemakai jasa merasa dilindungi haknya, dan para pengusaha maupun pengemudi tidak ada beban moral didalam mengusahakan maupun mengemudikan alat angkutannya dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi sumber hidup dan mandiri.
7. Kata **Terjangkau** yang berarti para pemakai jasa tidak terlalu dibebani biaya yang terlalu besar (cost tinggi) dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.
8. Kata **Handal** yang berarti menguasai teknologi sesuai dengan bidangnya.
9. Kata **Kompetitif** yang berarti mampu bersaing dan mengikuti perkembangan sistem.

B. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan yang berisi suatu pernyataan singkat, komprehensif mengenai tujuan, program dari Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan.

Dengan adanya misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal tentang bagaimana peranan dan program-program serta hasil yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dimasa yang akan datang. Dan dalam proses perumusan misi suatu organisasi harus memperhatikan masukan-masukan dari pihak penerima manfaat (stakeholders) serta memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan keadaan.

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan jasa transportasi yang tertib,aman, lancar,nyaman dan terjangkau.
2. Mewujudkan masyarakat Barito Selatan sadar akan Keselamatan berlalu lintas.
3. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dibidang Transportasi.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan ataupun tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas SDM Dinas Perhubungan, sehingga terwujudnya pelayanan yang optimal.

Pemenuhan kebutuhan publik dan tuntutan masyarakat dijadikan misi yang hendak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dan upaya peningkatan kualitas sistem pelayanan dan SDM sebagai unsur utama pelayanan juga perlu mendapat perhatian untuk memberikan layanan prima kepada stakeholders dan sekaligus memberikan kontribusi bagi pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan.

C. Tujuan dan Sasaran Stratejik

Tujuan Stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran Stratejik merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan menetapkan sejumlah ***tujuan dan sasaran*** yang relevan untuk masing-masing visi dan misi tersebut diatas sebagai berikut :

Tujuan :

1. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi di wilayah Kabupaten Barito Selatan.
2. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang dapat mengakses seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.
3. Terwujudnya pelayanan jasa transportasi bagi kesejahteraan masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat .
4. Terwujudnya penurunan angka kecelakaan antar moda transportasi menuju kecelakaan yang nihil.
5. Meningkatkan organisasi yang professional dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai di bidang tugasnya.

Sasaran:

1. Tersedianya sarana, prasarana serta fasilitas pendukungnya untuk kelancaran transportasi darat, udara dan sungai yang memadai untuk mendukung kelancaran mobilitas angkutan barang dan jasa yang menghubungkan seluruh Wilayah di Kabupaten Barito Selatan.
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai penunjang pembangunan daerah Kabupaten Barito Selatan dan tersedianya peraturan daerah yang mengatur standar tarif angkutan Darat, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Udara
3. Tersedianya fasilitas keselamatan penumpang yang berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas sarana transportasi.
4. Tersedianya tenaga aparatur yang memadai di bidang pengelolaan administrasi, keuangan dan kepengurusan barang
5. Tersedianya tenaga teknis dalam upaya mendukung peningkatan pembangunan dibidang transportasi.

D. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah uraian mengenai cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang terdiri dari **kebijakan**, **program** yang akan dilakukan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran atau tujuan tertentu.

Dalam rangka perwujudan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan dengan menetapkan kebijakan dan program sebagai berikut :

KEBIJAKAN		PROGRAM	
1	Meningkatkan kontribusi dalam menunjang peningkatan PAD.	1.1	Optimalisasi pungutan retribusi dan perijinan
2	Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pemberian perijinan	2.1 2.2 2.3	Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3	Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Selatan.	3.1 3.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLSJ/LLASDP Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4	Meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas	4.1 4.2 4.3	Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan
5	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan tarif angkutan	5.1	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
6	Meningkatkan keamanan dan kenyamanan pelaksanaan hari – hari besar keagamaan dan melaksanakan pengawalan terhadap kegiatan kunjungan Pejabat Pemerintah dari luar maupun dalam daerah Kabupaten Barito Selatan serta melaksanakan pengawalan Jemaah Haji	6.1 6.2	Peningkatan Pelayanan Angkutan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
7	Meningkatkan kualitas dan profesionalisme kapasitas sumber daya aparatur dibidang transportasi.	7.1 7.2 7.3	Pelayanan adminitrasi perkantoran Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur
8	Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional	8.1 8.2 8.3	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Pembangunan sarana dan prasarana Perhubungan
9	Koordinasi/kerjasama dengan instansi terkait	10.1	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

E. Rencana Kinerja

Rencana Kinerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sifatnya lebih teknis dan operasional dari pada Renstra. Komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra seperti Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta progam masih bersifat umum dan belum ditetapkan target-target yang hendak dicapai. Sedangkan komponen-komponen yang terkandung di dalam Renja meliputi Sasaran Strategik dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut berupa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun bersangkutan dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra. Setiap sasaran strategik diuraikan lebih rinci kedalam target indikator-indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai demikian pula kegiatan dirinci kedalam target indikator input, output dan outcome.

Untuk tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan rencana kinerjanya berupa target indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai. Target indikator sasaran tersebut akan dicapai dalam tahun 2024 dengan menggunakan program dan kegiatan. Uraian lebih lanjut masing-masing komponen Renja tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIK	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET (Rp)
1.	Meningkatkan kontribusi retribusi perizinan dan pelayanan terhadap PAD.	Terwujudnya pemasukan Daerah (PAD) dari retribusi dan distribusi pelayanan	Rp.2.146.500.000,00
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 4.503.307.158,00
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 108.561.445,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 5.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Rp. 5.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Rp. 25.000.000,00

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 35.000.000,00
8	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 10.000.000,00
9	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Rp. 15.000.000,00
10	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 10.000.000,00
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.000.000,00
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 50.000.000,00
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 125.000.000,00
14	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda	Tersedianya Barang Cetak dan Pengganda	Rp. 70.000.000,00
15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 7.500.000,00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lancarnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 746.650.000,00
17	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Rp. 485.030.806,00
18	Penyediaan Jasa Surat Menyura	Lancarnya Administrasi Perkantoran	Rp. 10.000.000,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 161.396.465,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.581.739.400,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp. 253.904.000,00

	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Operasional atau Lapangan	
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 20.000.000,00
23	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kurangnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Rp. 143.124.800,00
24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp. 80.000.000,00
25	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Rp. 10.000.000,00
25	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 40.000.000,00
26	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 12.000.000,00
27	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 33.000.000,00
28	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 48.000.000,00
29	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 165.000.000,00
30	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Rp. 25.000.000,00
31	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Lancarnya Arus Lalu Lintas	Rp. 170.000.000,00

32	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Lancarnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 80.000.000,00
33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 150.000.000,00
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00
35	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Persentase Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Rp. 1.330.507.389,00
36	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Lancarnya Arus Lalu Lintas Sungai	Rp. 299.802.493.20
			Rp. 10.712.083.757

BAGIAN KEDUA

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

BAB I

PENGUKURAN KINERJA

A. Indikator Kinerja

Pada pengukuran kinerja kegiatan digunakan kelompok indikator kinerja Input, Output, dan Outcome. Masing-masing kelompok indikator tersebut terdiri dari indikator kinerja yang penentuannya berdasarkan materi dari kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan.

Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, kecuali untuk indikator kinerja outcome masih perlu dilakukan penyempurnaan mengenai bentuk dan satuan indikatornya yang lebih tepat.

Kelompok indikator kinerja input (masukan) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output (keluaran), misalnya SDM, dana, waktu, teknologi dan sebagainya. Kelompok indikator output merupakan produk/jasa (fisik dan non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.

Sedangkan kelompok indikator outcome mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka waktu menengah, atau merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kelompok indikator *benefit* (manfaat) menggambarkan kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan kelompok indikator *impact* (dampak) merupakan ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pengukuran kinerja mencatumkan kelompok indikator kinerja *benefit* dan *impact* yang berbasis kepada Renstra yang dapat memberikan nilai manfaat dan dampak dari kegiatan yang dilaksanakan.

Disamping menggunakan kelompok indikator diatas, dalam LAKIP 2024 ini juga menggunakan indikator sasaran sebagai tolok ukur untuk menilai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan. Indikator Sasaran tersebut dapat melekat pada kegiatan atau pada program-program yang dilaksanakan selama tahun 2024, jadi dapat merupakan atau setara dengan kelompok indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat mutlak bagi pengukuran kinerja. Kelompok indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran bervariasi tergantung jenis indikator sasarannya. Kriteria pengukuran yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan.

Target kinerja itu merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya pada akhir tahun 2024, target kinerja (*performance plan*) ini akan dibandingkan dengan realisasinya (*performance result*), sehingga diketahui celah kinerja (*performance gap*). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak keberhasilannya, jika ada dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja dimasa datang (*performance improvement*). Dengan mengukur kinerja sasaran, indikator yang dipakai adalah indikator absolut. Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmetika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat keprogram, akhirnya hingga kesasaran. Capaian absolut sasaran itu sendiri secara logika-apriori dideduksikan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya. Oleh karena itu pengukuran tetap dimulai dari pengukuran kegiatan. Dalam mengukur keberhasilan suatu kegiatan, indikator yang digunakan masih sama dengan cara pengukuran tahun lalu, yaitu berupa *input*, *output* dan *outcome*. Dalam kaitan deduktif, maka capaian kinerja sasaran umumnya dikaitkan dengan capaian *outcome* kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja terdekat. Selain itu *outcome* juga dapat dipandang sebagai suatu indikator lebih mencakup (*lagging indikator*), yang dalam hal ini berarti indikator yang satuannya dapat dianggap sebagai lebih luas dari pada atau gabungan dari beberapa indikator kegiatan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kemudian dikategorisasikan pencapaian kinerja kedalam empat kategori sebagai berikut :

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat baik
II	80 % hingga 90 %	Baik
III	60 % hingga 80 %	Cukup
IV	Kurang dari 60 %	Kurang

Berdasarkan kebijakan pembangunan tersebut diatas, kemudian menjadi dasar pengembangan program utama yang dilaksanakan pada tahun 2024. Sebagai tindak lanjut dari **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.**

Tabel 2.1.3. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	≥ 91	Sangat Baik
2	75,1 – 90,0	Tinggi
3	65,1 – 75,0	Sedang
4	50,1 – 65,0	Rendah
5	≤ 50,0	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 54 Tahun 2010

B. Pengukuran Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja dilakukan baik terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan kelompok

indikator kinerja (*input, output* dan *outcome*) menurut rencana dengan realisasi. Hasil perbandingan dibuat dalam prosentase realisasi dari rencana, uraian selengkapnya terlampir pada Form : PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan).

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya, hasil perbandingan dibuatkan dalam bentuk prosentase. Hasil perbandingan selengkapnya dibuatkan dalam Form : PPS (Pengukuran kinerja sasaran) disajikan terlampir .

Berdasarkan kedua format tersebut diatas dapat diuraikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024 sebagai berikut :

2.3.1. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024
1.	Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi	3%
		Jumlah Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota	11.650 org
		Peningkatan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok	11.750 org
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan	10 %
		Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan)	4 %
		Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR)	420 KIR
		Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang	10 Buah

1.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Target Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan baik terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan kelompok indikator kinerja (input, output dan outcome) menurut rencana dengan realisasi. Hasil perbandingan dibuat dalam prosentase realisasi dari rencana, uraian selengkapnya terlampir :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisai 2024
1.	Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi	3 %	3%
		Jumlah Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota	11.650 org	7225 org
		Peningkatan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok	11.750 org	27468 org
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan	10%	2.82%
		Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan)	4%	3 %
		Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR)	420 KIR	367KIR
		Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang	10 Buah	10 Buah

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Pada pengukuran kinerja kegiatan digunakan kelompok indikator kinerja Input, Output, dan Outcome. Masing-masing kelompok indikator tersebut terdiri dari indikator kinerja yang penentuannya berdasarkan materi dari kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, kecuali untuk indikator kinerja outcome masih perlu dilakukan penyempurnaan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1.	Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi	3%	3%
		Jumlah Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota	9.950 org	7225 org
		Peningkatan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok	34.304 org	27468 org
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan	134%	2.82%
		Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan)	3 %	3 %
		Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR)	283 KIR	367KIR
		Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang	10 Buah	10 Buah

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi 2024	Ket
1.	Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat	Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi	3 %	3%	
		Jumlah Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota	11.650 org	7225 org	
		Peningkatan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok	11.750 org	27468 org	
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	Prosentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan	10 %	2.82%	
		Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan)	4 %	3 %	
		Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR)	420 KIR	367KIR	
		Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang	10 Buah	10 Buah	

2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidak berhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator outcome. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia

1. Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat

Capaian kinerja Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1.1 Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi

Capaian kinerja Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi pada Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari berkali pengawalan dan pengamanan jemaah haji dalam satu tahun ditargetkan 2 kali pengawalan, maka pelaksanaan pengawalan dan pengamana jemaah haji tahun 2024 terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan, maka dari itu Indeks kepuasan jemaah haji terhadap pelayanan transportasi dengan target 3% dengan realisasi 3% atau **Tercapai**.

1.2. Jumlah Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota

Capaian kinerja Indeks kepuasan Penumpang Pergi dan Datang di Terminal Buntok Kota terhadap pelayanan transportasi pada Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari jumlah penumpang yang datang dan pergi dalam satu tahun ditargetkan

11.650 Orang, maka jumlah arus penumpang yang datang dan pergi di terminal Buntok kota tahun 2024 terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan, maka dari itu Indeks kepuasan Penumpang terhadap pelayanan transportasi dengan target 11.650 orang dengan realisasi 7.225 orang atau 62.02% **Tidak Tercapai.**

1.3. Peningkatan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok

Capaian kinerja Indeks kepuasan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok terhadap pelayanan transportasi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari jumlah keluar dan masuk penumpang di dermaga pelabuhan dalam satu tahun dapat ditargetkan 11.750 orang, maka arus jumlah penumpang dermaga tahun 2024 terealisasi sebagaimana yang telah direncanakan, maka dari itu Indeks kepuasan Jumlah Penumpang di Dermaga Buntok terhadap pelayanan transportasi sungai dengan target 11.750 orang dengan realisasi 27.468 orang atau 233.77% **Tercapai.**

2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Capaian kinerja Meningkatnya Keselamatan Transportasi Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1.1. Prosentase jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan

Capaian kinerja Indeks jumlah fasilitas keselamatan berupa rambu lalu lintas jalan yang terpasang dibanding jumlah kebutuhan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari jumlah rambu lalu lintas jalan yang terpasang dalam satu tahun dapat ditargetkan 10%, maka dari itu Indeks kepuasan lalu lintas jalan terhadap transportasi darat dengan target 10% dengan realisasi 2.82% atau **Tidak Tercapai.**

1.2. Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan)

Capaian kinerja Menurunnya jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan) Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari jumlah pelanggaran muatan angkutan barang (kendaraan) dalam satu tahun dapat ditargetkan 4%, maka dari itu Indeks kepuasan lalu lintas jalan terhadap pelanggaran lalu

lintas angkutan darat dengan target 4% dengan realisasi 3 % atau **Tercapai**.

1.3. Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas melalui manajemen rekayasa lalu lintas

Capaian kinerja Jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas melalui manajemen rekayasa lalu lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dilihat dari jumlah kegiatan pengaturan lalu lintas dalam satu tahun dapat ditargetkan 22 kegiatan, maka dari itu Indeks kepuasan lalu lintas jalan terhadap pengaturan lalu lintas angkutan darat dengan target 22 kegiatan dengan realisasi 3 atau **Tidak Tercapai**.

1.4. Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR)

Capaian kinerja Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dapat dilihat dari jumlah kendaraan yang wajib uji KIR dalam satu tahun dapat ditargetkan 420 unit kendaraan, maka dari itu Indeks kepuasan lalu lintas jalan terhadap uji KIR berkala angkutan darat dengan target 420 unit kendaraan dengan realisasi 367 Unit Kendaraan atau **Tidak Tercapai**.

1.5. Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang

Capaian kinerja Peningkatan Jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tahun 2024, dapat dilihat dari jumlah Rambu – rambu Sungai yang Terpasang dalam satu tahun dapat ditargetkan 10 buah, maka dari itu Indeks kepuasan lalu lintas sungai terhadap angkutan sungai dengan target 10 buah dengan realisasi 10 buah atau **Tercapai**.

2.3.6. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Penyusunan program dan kegiatan ditujukan untuk menyusun akuntabilitas kinerja organisasi, namun perlu disadari juga bahwa program dan kegiatan merupakan bagian dari pencapaian tujuan perencanaan.

Tahun **2024** penggunaan sumber daya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia sudah cukup memadai sehingga tingkat capaian kinerja program dan kegiatan pada tahun 2023 mencapai **95.45 %**.

1. Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat

Meningkatnya jumlah penumpang dan bongkar muat dilaksanakan melalui 1 (satu) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ), dan 6 (enam) kegiatan selama 1 tahun dengan pagu anggaran **Rp.1806.124.600** Dengan realisasi keuangan **Rp. 775.908.505** Atau **96.25%**. Capaian kinerja keuangan **Sangat Baik**.

Program / Kegiatan	Pagu 2024	Realisasi	Capaian %
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota	223.124.600	221.171.750	99.12
2. Pengelolaan Terminal Tipe C	10.000.000	10.000.000	100.00
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	40.000.000	39.366.000	98.42
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	93.000.000	81.761.555	87.92
5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	360.000.000	349.574.200	97.10
6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	74.035.000	92.54
JUMLAH	1.682.217.798	1.673.120.308	99.46

2. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Meningkatnya Keselamatan Transportasi dilaksanakan melalui 1 (satu) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LAJ) dan 1 (satu) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten Kota dan 2 (dua) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan selama 1 (satu) tahun dengan pagu anggaran **Rp. 223.124.600** dengan realisasi keuangan **Rp.221.171.750** atau **99,12%**. Capaian kinerja keuangan **Sangat Baik**.

Program / Kegiatan	Pagu 2024	Realisasi	Capaian %
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota			
- Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	173.951.896	173.386.420	99.67
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	58.285.492	58.173.992	99.81
JUMLAH	223.124.600	221.171.750	99,12

Meningkatnya Keselamatan Transportasi dilaksanakan melalui 1 (satu) Program Pengelolaan Pelayaran dan 1 (Satu) kegiatan Penertiban Izi Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota dan 1 (Satu) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota selama 1 tahun dengan pagu anggaran **Rp. 150.000.000** dengan realisasi keuangan **Rp. 141.685.000 atau 94.46%**. Capaian kinerja keuangan **Sangat Baik**.

Program / Kegiatan	Pagu 2024	Realiasi	Capaian %
2. Program Pengelolaan Pelayaran			
1. Penertiban Izi Usaha Angkutan Laut Bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000	141.685.000	94.46%
JUMLAH	150.000.000	141.685.000	94.46%

1. Target Pendapatan

Sebagai kontribusi Dinas Perhubungan dan Kabupaten Barito Selatan terhadap upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan target pendapatan tahun 2021 sebesar **Rp. 2.075.600.000,00,-** (Dua Miliar Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 2.910.311.500,00,-** atau **140.22%** (Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) meliputi sumber penerimaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	TARGET TA. 2024	REALISASI	%
1.	Retribusi Pel. Parkir Tepi Jalan Umum	130.000.000.00	40.660.000,00	31.28%
2.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	87.000.000,00	00	0%
3.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10.000.000.00	3.000.000,00	30.00%
4.	Retribusi Terminal Dalam Kota	7.500.000.00	1.00.000,00	1.33%
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	93.570.000,00	58.48%
6.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pasar Lama Buntok	35.000.000.00	00	0%
7.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pasar Beringin Buntok	15.000.000.00	00	0%
8.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Ujung Jelapat	950.000.000.00	1.791.667.500,00	188.60%
9.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Jenamas/Rantau Kujang	45.000.000.00	00	0%
10.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Mengkatip	40.000.000.00	00	0%
11.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Bangkuang	50.000.000.00	21.120.000,00	52.24%
12.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Pandang	40.000.000.00	1.990.000,00	4.98%
13.	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Lainnya	35.000.000.00	00	0%
14.	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Buntok	80.000.000.00	7.260.000,00	9.08%
15.	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Pandang	125.000.000.00	14.960.000,00	11.97%
16.	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Bangkuang	80.000.000.00	00	0%
17.	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Mengkatip	80.000.000.00	00	0%
18.	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Rantau Kujang	175.000.000.00	00	0%
19	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	00	00%
Jumlah		2.146.500.000,00	1.979.327.500,00	92.21%

C. Aspek Keuangan Tahun 2024

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan ditunjang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebesar **Rp. 2.146.500.000,00** (Dua Miliar Seratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 1.979.327.500,00** (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Raus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) atau sebesar **92.21 %**.

Sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan ditunjang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar **Rp. 10.712.083.757,00,-** (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dan terealisasi sebesar **Rp. 10.224.493.415,00,-** (Sepuluh Miliar Dua Raus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Belas Rupiah) atau sebesar **95.45%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Belanja	Anggaran Rp	Realisasi	
			Rp.	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	Pendapatan Asli Daerah	2.146.500.000,00	1.979.327.500,00	92.21%
	Retribusi Pel. Parkir Tepi Jalan Umum	130.000.000.00	40.660.000,00	31.28%
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	87.000.000,00	00	0%
	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	10,000,000.00	3.000.000,00	30.00%
	Retribusi Terminal Dalam Kota	7,500,000.00	1.00.000,00	1.33%
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	160.000.000,00	93.570.000,00	58.48%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pasar Lama Buntok	35,000,000.00	00	0%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pasar Beringin Buntok	15,000,000.00	00	0%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Ujung Jelapat	950,000,000.00	1.791.667.500,00	188.60%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Jenamas/Rantau Kujang	45.000,000.00	00	0%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Mengkatip	40.000,000.00	00	0%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Bangkuang	50.000.000.00	21.120.000,00	52.24%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Pendang	40.000.000.00	1.990.000,00	4.98%
	Retribusi Bongkar Muat Dermaga Pelabuhan Lainnya	35.000.000.00	00	0%
	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Buntok	80,000,000.00	7.260.000,00	9.08%

	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Pendang	125,000,000.00	14.960.000,00	11.97%
	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Bangkuang	80,000,000.00	00	0%
	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Mengkatip	80,000,000.00	00	0%
	Ret. Jasa Sandar & Persetujuan Berlayar UPTD Dermaga Rantau Kujang	175,000,000.00	00	0%
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.000.000,00	00	00%
JUMLAH		2.146.500.000,00	1.979.327.500,00	92.21%
II.	Belanja Daerah			
	Belanja Pegawai			
	Belanja Pegawai :			
	1. Gaji Pokok/Uang Representasi	2.364.215.358,00	2.251.109.694,00	95.22%
	2. Tunjangan Keluarga	236.929.758,00	222.179.672,00	93.77%
	3. Tunjangan Jabatan	215.046.600,00	204.274.616,00	94.99%
	4. Tunjangan Fungsional	9.914.400,00	00	0%
	5. Tunjangan Beras	44.242.500,00	42.380.334,00	95.79%
	6. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	120.043.698,00	113.844.240,00	94.84%
	7. Pembulatan Gaji	25.218.544,00	23.960.230,00	95.01%
	8. Tambahan Penghasilan Lainnya	43.300,00	28.050,00	64.78%
	9. Tambahan Penghasilan Lainnya	1.278.213.000,00	1.192.160.500,00	93.27%
Jumlah		4.293.867.158,00	4.049.937.336,00	94.32%
	Belanja Langsung.	10.963.975.225,00	10.652.820.525	97.16%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.731.782.116,00	3.533.368.538,00	94.68%
	2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	806.124.600,00	775.908.505,00	96.25%
	3. Program Pengelolaan Pelayanan	1.880.309.883,00	1.865.279.036,00	99.20%
	J u m l a h	10.712.083.757,00	10.224.493.415,00	95.45%

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap hasil kegiatan yang diuraikan pada form PKK, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja keuangan berupa penggunaan dana perkegiatan fisik tahun 2024 secara keseluruhan indikator kinerja mempunyai nilai capaian **95.45%** Pengukuran dilakukan terhadap kegiatan tahun 2024 yang terdiri dari **3** (tiga) program dengan jumlah kegiatan **16** (enam belas) dan **35** (tiga puluh lima) sub kegiatan atau dengan total dana yang tersedia sebesar **Rp. 10.712.083.757,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 10.224.493.415,00** atau **97.39%** dari target yang ditetapkan.

BAB II

UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Dari berbagai permasalahan terkait dengan Renstra dan LAKIP seperti diuraikan diatas terdapat beberapa permasalahan dan pemecahan yang telah dan akan diambil untuk mengatasinya yaitu sebagai berikut :

a. Permasalahan :

1. Sehubungan dengan keterlambatan pencairan dana dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barito Selatan hal ini Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan mengalami kesulitan dalam penyelesaian laporan pertanggung jawaban keuangan TA. 2024.
2. Untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur khususnya untuk pembangunan gedung kantor tahun 2024 belum menyelesaikan bangunan secara keseluruhan.
3. Sasaran dan program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dengan kegiatan pengadaan rambu lalu lintas masih belum mencukupi untuk seluruh jalan dalam wilayah Kabupaten Barito Selatan.
4. Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang perhubungan masih belum memadai dikarenakan terjadinya mutasi pegawai ang berasal dari dinas/instansi lain dengan berbagai latar belakang pendidikan yang belum sepenuhnya menguasai masalah perhubungan.
5. Banyak program Dinas Perhubungan dan usulan dari masyarakat yang ada ke Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan baik melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan dan Pokok-pokok Pikiran DPRD serta secara organisasi maupun kelompok masyarakat Desa yang tidak dapat di anggarkan melalui dana APBD karena keterbatasan pagu anggaran yang diberikan ke Dishub oleh tim anggaran Pemda Barsel.

b. Pemecahan masalah.

Langkah – langkah yang diambil guna menyelesaikan masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan keterlambatan pencairan dana dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Barito Selatan, maka kami mengharapkan tidak akan terjadi lagi untuk tahun– tahun yang akan datang.
2. Dengan telah selesainya SOTK Pemkab Barsel 2024 maka terjadi perampingan bidang – bidang yang ada di Dishub sehingga pengadaan bangunan ruang kantor yang ada mencukupi untuk menampung pegawai yang telah tersedia.
3. Untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas baik di darat maupun di sungai maka pada tahun anggaran berikutnya di usulkan kembali pengadaannya serta untuk memelihara rambu yang ada usulkan kegiatan pemeliharaan rutin rambu-rambu baik di darat maupun di sungai serta marka jalan dalam kota buntok dan usulan LPJU tenaga surya yang di usulkan ke Provinsi maupun Perhubungan RI dan rehab terminal kota dan terminal sanggu.
5. Dengan adanya kekurangan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia di Bidang Perhubungan maka perlu penambahan pegawai yang berkualifikasi dan mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan di bidang Perhubungan.
6. Dinas Perhubungan telah berupaya untuk mengusulkan program-program /kegiatan tersebut baik melalui APBD tingkat I dan Kementerian Perhubungan RI melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dengan harapan semoga dapat direalisasikan pada Tahun 2025 dan 2026 yang akan datang.

BAB III

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan dan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik apakah telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan tahun 2024 masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang cukup berat baik dari pihak eksternal maupun kelemahan dari dalam instansi sendiri.

Walaupun secara umum apa yang dilaporkan dalam LAKIP ini telah mempunyai nilai rata-rata baik , tetapi belum berarti visi Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan berupa “Terwujudnya Transportasi, yang lancar, aman ,tertib, nyaman dan terjangkau, handal dan kompetitif” akan tercapai dengan mudah. Keberhasilan yang diperoleh saat ini dapat mempengaruhi daya kritis, oleh karena itu seharusnya seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan tetap mempertahankan prestasi yang telah ada, dan bila mungkin dikembangkan lagi.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memacu penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan pada khususnya dan pada pemerintahan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan pada umumnya sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Baito Selatan secara keseluruhan dapat tercapai.

Kami menyadari LAKIP tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, sehubungan dengan itu kritik dan saran penyempurnaan dari pembaca dan pemakai sangat kami harapkan. Sehingga apa yang kami laporkan akan lebih transparan dan akuntabel, sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menjadi cita-cita kita bersama serta tuntutan pemerintah.

Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2024					Formulir PPS
Instansi : DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO SELATAN					
Sasaran	Indikator Sasaran	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Prosentase Penc.Target (%)	K e t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Meningkatkan kontribusi retribusi perijinan dan pelayanan terhadap PAD.	Terwujudnya pemasukan Daerah (PAD) dari retribusi dan distribusi pelayanan	2.146.500.000,00	1.979.327.500,00	92.21%	Tercapai
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.293.867.158,00	4.049.937.336,00	94.32%	Tercapai
3. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	143.561.445,00	139.145.858,00	96.92%	Tercapai
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi barang milik daerah	45.000.000,00	44.512.000,00	98.92%	Tercapai
5. Administrasi Pendapatan Daerah Kesenangan Perangkat Darah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.910.000,00	99.64%	Tercapai
6. Administrasi Umum Perangkat Daearh	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah	1.006.150.000,00	994.509.251,00	98.84%	Tercapai
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	485.030.806,00	476.250.900,00	98.19%	Tercapai
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.753.135.865,00	1.611.276.329,00	91.91%	Tercapai
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.904.000,00	242.764.200,00	88.63%	Tercapai
10. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Menurunya angka kecelakaan Lau Lintas Darat	223.124.600,00	221.171.750,00	99.12%	Tercapai
11. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	Tercapai
12. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tersedianya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	40.000.000,00	39.366.000,00	98.42%	Tercapai
13. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	93.000.000,00	81.761.555,00	87.92%	Tercapai
14.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas untuk Cipta kondisi KAMSELTIBCAR Kabupaten Barito Selatan	360.000.000,00	349.574.200,00	97.10%	Tercapai
15.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	74.035.000,00	92.54%	Tercapai

16.Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	141.685.000,00	94.46%	Tercapai
17.Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	100.000.000,00	97.373.400,00	97.37%	Tercapai
18.Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	1.630.309.883,00	1.626.220.636,00	99.75%	Tercapai

FORMULIR PKK							
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN							
TAHUN 2024							
INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN							
KABUPATEN BARITO SELATAN							
Program	Kegiatan						
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Target (%)	K e t.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Capaian Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi keuangan		4.293.867.158,00	4.049.937.336,00	94.32%	Tercapai
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bulan	4.293.867.158,00	4.049.937.336,00	94.32%	Tercapai
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah laporan capaian dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	108.561.445,00	106.366.058,00	97.98%	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5.000.000,00	4.980.000,00	99.60%	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5.000.000,00	3.760.000,00	75.20%	Tercapai
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	25.000.000,00	24.036.800,00	96.16%	Tercapai
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah					
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	35.000.000,00	34.672.000,00	99.06%	Tercapai

	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10.000.000,00	9.840.000,00	98.40%	Tercapai
	Administrasi Pendapatan Daerah Kesenangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah					
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen	15.000.000,00	14.986.000,00	99.91%	Tercapai
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	10.000.000,00	9.924.000,00	99.24%	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah					Tercapai
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7.000.000,00	6.965.000,00	99.50%	Tercapai
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50.000.000,00	45.100.000,00	90.20%	Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	125.000.000,00	124.200.000,00	99.36%	Tercapai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	70.000.000,00	69.280.000,00	99.74%	Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	7.500.000,00	6.600.000,00	88.00%	Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	746.650.000,00	741.824.251,00	99.35%	Tercapai
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Tercapai
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	485.030.806,00	476.250.900,00	98.19%	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	10.000.000,00	6.000.000,00	60.00%	Tercapai

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	161.396.465,00	97.598.920,00	60.47%	Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1.581.739.400,00	1.507.677.409,00	95.32%	Tercapai
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tercapai
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	253.904.000,00	233.144.200,00	91.82%	Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20.000.000,00	9.620.000,00	48.10%	Tidak Tercapai
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)		Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang					
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				%	Tercapai
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	143.124.600,00	141.981.750,00	99.20%	Tercapai
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	80.000.000,00	79.190.000,00	98.99%	Tercapai
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Fasilitas Terminal yang berfungsi					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Fasilitas Utama dan Pendukung	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	100%	Tercapai
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Laporan	40.000.000,00	39.366.000,00	98.42%	Tercapai

	Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota					
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor					Tercapai
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen	12.000.000,00	10.000.000,00	83.33%	Tercapai
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	33.000.000,00	30.940.555,00	93.76%	Tercapai
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	48.000.000,00	40.821.000,00	85.04%	Tercapai
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota					Tercapai
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Tertatanya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	170.000.000,00	161.137.600,00	94.79%	Tercapai
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	165.000.000,00	164.040.600,00	99.42%	Tercapai
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	25.000.000,00	24.396.000,00	97.58%	Tercapai
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				%	Tercapai

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	80.000.000,00	74.035.000,00	92.54%	Tercapai
3. Program Pengelolaan Pelayaran		Persentase fasilitas perlengkapan sungai					
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota				%	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	150.000.000,00	141.685.000,00	94.46%	Tercapai
	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalamDaerah Kabupaten/ Kota	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota				%	Tercapai
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	100.000.000,00	97.373.400,00	97.37%	Tercapai
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Dermaga yang layak fungsi				%	Tercapai
	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit	1.330.507.389,80	1.328.697.636,00	99.86%	Tercapai
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan	299.802.493,20	297.523.000,00	99.24%	Tercapai
JUMLAH				10.712.083.757,00	10.224.493.415,00	95.45%	Tercapai



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO

DINAS PERHUBUNGAN

JL. Pahlawan Km. 6 Buntok

Kabupaten Barito Selatan

Provinsi Kalimantan Tengah

Telp. (0525) 21505 Kode Pos 73711

Email: dinasperhubungankabbarsel@gmail.com